



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2024**





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu selama tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yaitu

“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT KOTA BENGKULU YANG BAHAGIA DAN RELIGIUS”

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2024 - 2026. Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu terkhususnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024

Bengkulu, 24 Februari 2025

Sekretaris Daerah



ARIF GUNADI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Di awal Tahun 2024 telah dilakukan penandatanganan Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang meliputi sasaran, indikator dan target capaian kinerja mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu 2024 - 2026. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun anggaran, yaitu dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dari hasil analisis dan evaluasi secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu secara keseluruhan tingkat capaian kinerja adalah **baik**, meskipun masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan realisasi capaiannya pada tahun 2025 mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Fungsi dan Tugas	5
1.4 Isu Strategis.....	6
1.5 Keadaan Pegawai.....	9
1.6 Keuangan	10
1.7 Sistematis LKjIP.....	11
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	19
2.4 Perjanjian Kinerja	39
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	41
3.2 Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV : PENUTUP	57
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja	39
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja	41
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (satu)	43
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (dua)	51
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga)	52
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2024	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin 10

Gambar 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 10



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kota Bengkulu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

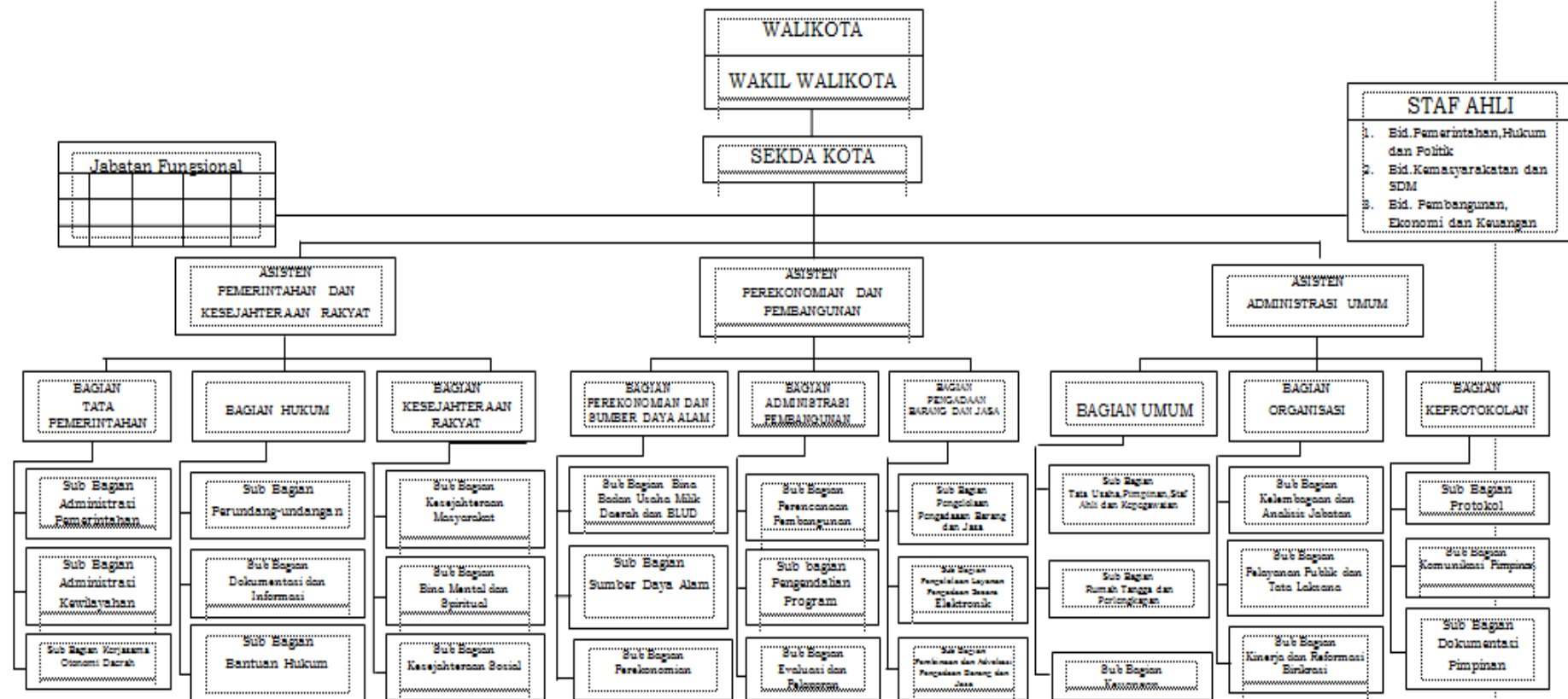
1.1 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu di pimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Administrasian Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Hukum, mencakup :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi ;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Mental dan Spiritual;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi :
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - c) Sub Bagian Perekonomian.
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang / Jasa, mencakup :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

- c. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi :
- 1) Bagian Umum, mencakup :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Bagian Organisasi, mencakup :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3) Bagian Keprotokolan, mencakup :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,

dto

H. HELMI HASAN

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu disusun berdasarkan beberapa aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023.

1.3 Fungsi dan Tugas

Sekretariat Daerah Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu yang merupakan tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

Bengkulu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, Sekretariat Daerah Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dalam menjalankan tugas Sekretariat Daerah Kota Bengkulu mempunyai fungsi dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan organisasi Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Isu Strategis

- 1) Aspek-aspek strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2024 sebagai berikut :

a) Aspek Kelembagaan

Sekretariat Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang menjalankan tugas untuk membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, yang diantaranya melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan membina penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Dalam hal ini Sekretariat Daerah selalu memperhatikan isu-isu strategis yang diperoleh langsung oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu atau dengan cara mengakomodir isu-isu yang berasal dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka ketercukupan dari aspek kuantitas dan kualitas SDM sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, yaitu dari segi jumlah dan kompetensi pegawai yang memahami permasalahan kebijakan dan administrasi penyelenggaraan urusan.

c) Aspek Sarana Prasarana

Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai pejabat eselon tertinggi dengan hampir semua pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bengkulu melalui Sekretaris Daerah, hal ini secara tidak langsung menyebabkan aktivitas pemerintahan yang di lingkungan Sekretariat Daerah relatif lebih banyak dari Perangkat Daerah lainnya. Sekretariat Daerah juga mengurus urusan rumah tangga pimpinan dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota, sehingga kelengkapan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

2) Permasalahan Utama (*strategic issued*) Organisasi

Permasalahan Utama (*strategic issued*) yang perlu mendapat perhatian khusus pada tahun 2024-2026 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga Perangkat Daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perizinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik sehingga dapat menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.

3. Pedayagunaan sumber daya aparatur daerah.

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas.

Disamping permasalahan utama (*strategic issued*) sebagaimana tersebut di atas, isu-isu yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut :

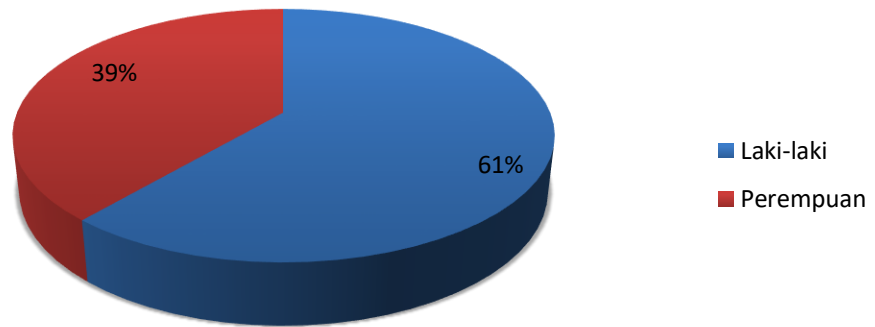
1. Grand Desing Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2016-2019 Pemerintah Kota Bengkulu;
2. Kebutuhan akan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) serta regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif melalui penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Mewujudkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk mendorong terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*;
5. Penyusunan sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien;
6. Peningkatan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
7. Peningkatan kualitas terhadap aparatur daerah dalam pengelolaan aparatur daerah.

1.5 Keadaan Pegawai

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai Negeri Sipil)

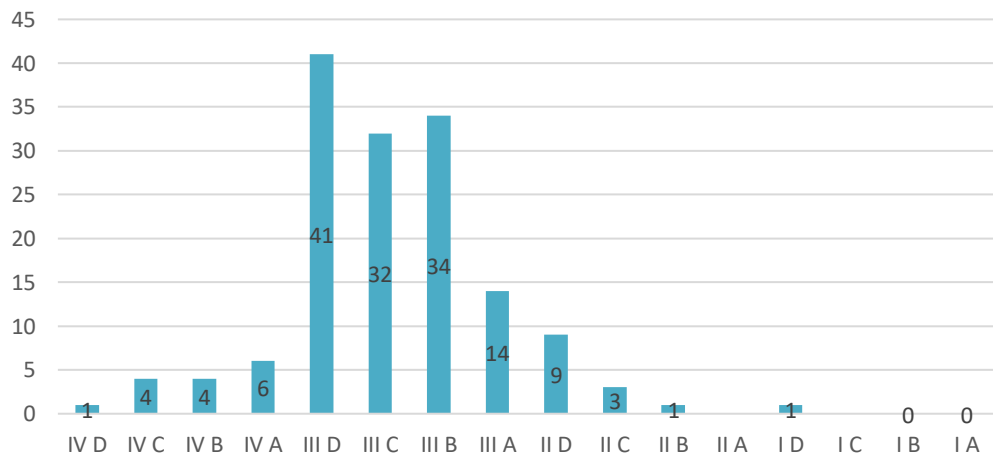
Sekretariat Daerah Kota Bengkulu memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 150 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1.1
Persentase Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas PNS yang bertugas di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu adalah Laki-laki dengan persentase 61% dan Perempuan dengan persentase 39%.

Gambar 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan



Dilihat dari gambar di atas, maka PNS di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu mayoritas berada pada Golongan III.D (Penata Muda Tingkat.I) dengan jumlah 41 Orang dari 150 Orang.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kota

Bengkulu pada tahun 2024 berasal dari APBD Kota Bengkulu. Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 55.182.174.278,-** yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 1.4
Program dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2024

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 48.722.324.466
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 4.347.473. 632
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 2.112.376.180
	Jumlah	Rp. 55.182.174.278

Sumber Data : Bagian Pembangunan Setda

1.7 Sistematis LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Struktur Organisasi
- B. Landasan Hukum
- C. Fungsi dan Tugas
- D. Isu Strategis
- E. Keadaan Pegawai
- F. Keuangan
- G. Sistematika LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- D. Perjanjian Kerja (PK)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Tahun 2024
2. Realisasi 2023 dengan realisasi 2024
3. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah dimana salah satunya adalah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026, penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dibuat pada masa Kepala Daerah terpilih, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah melalui tahapan yang simultan yang diawali dengan proses penyusunan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 yang melibatkan *stakeholders* terkait pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kota Bengkulu merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan *stakeholders* terkait. Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dimuat program dan

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, yang dirumuskan, bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau yang dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam periode tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dalam rangka memecahkan masalah serta isu strategis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut :

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2024-2026

Tabel T-C.25.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3.0	3.1	3.2	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP daerah	12.41	12.91	12.91
							Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	60%	65%	75%
							Persentase rancangan perda dan perkara yang diharmonisasi	65%	68%	70%
							Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	100%	100%	100%

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2024-2026

							Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	B	B	B
							Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
							Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	75%	80%	85%

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Dalam hal ini, indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan. Harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan organisasi sebagai dasar penilaian kinerja. IKU Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah ditetapkan mengacu dengan Renstra, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formulasi perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)			
		Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP daerah	Nilai Kemenpan RB	Kemenpan RB	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
			Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Perikatan Kerjasama Dikali 100%	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Jumlah Rancangan Perda Menjadi Perda Dibagi Jumlah Rancangan Perda Yang Diajukan Untuk Ditetapkan Sebagai Perda X 100%	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu Dibagi Jumlah Perangkat Daerah X 100	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai Ikm Minimal B Dibagi Jumlah Perangkat Daerah Yang Dinilai X 100%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

			Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Jumlah Kebijakan Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Kebijakan Yang Dihasilkan Per Tahun X 100%	Bagian Kesra, Bagian Perekonomian	Bagian Kesra, Bagian Perekonomian
			Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Jumlah Tingkat Capaian Seluruh Program Setda Dibagi Jumlah Program Setda	Bagian Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Keprotokolan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Keprotokolan, Bagian Pengadaan barang dan Jasa
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Bagian Pembangunan	Bagian Pembangunan
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	LHE Inspektorat	Bagian Organisasi dan Tata	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

					Laksana	
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024, akan tetapi dengan adanya Refocusin dan juga Anggaran Perubahan serta terkait dengan penangguhan SPD maka banyak kegiatan tahun 2024 tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak ada anggaran. Berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu :

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP daerah	12,41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel	90	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	72.217.400
		Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	B		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan	4 Dokumen	53.500.700
					Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	4 Laporan	51.183.800

		Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	75				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	17.986.870
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	21.174.950
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 laporan	141.032.100

								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	180 orang/bulan	19.633.614.328
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	999.240.000
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250 dokumen/9 bagian	93.239.000

								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	79.225.400
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	447.000.000
								Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	178.881.400

							Administ rasi Umum Perangk at Daerah	Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	145.197.500
								Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang disediakan	9 paket	408.779.600
								Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaa n Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	600.000.000
								Penyedia an Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang disediakan	16 paket	348.619.000

								Fasilitasi Kunjunga n Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapora n	1.291.176.00 0
								Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD	Jumlah laporan penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600 lapora n	3.745.622.17 8
								Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokum en	104.378.000
							Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air,dan Listrik	12 lapora n	1.503.998.70 0
								Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	12 lapora n	92.450.000

								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	6.325.271.340
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31 unit	1.429.915.000

								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	85 unit	1.576.950.000
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	195.000.000
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan KDH/WKDH	2 orang/bulan	784.033.000

								Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	Jumlah paket pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH yang disediakan	92 Paket	701.612.500
								Pelaksanaan Medical Check Up KDH dan WKDH	Jumlah orang yang menerima medical check up KDH dan WKDH	8 Orang	50.000.000
							Fasilitas Kerumahaan Sekretaris Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga KDH yang disediakan	12 Paket	4.005.528.500
								Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga WKDH yang disediakan	12 Paket	852.769.000

								Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	5 Paket	1.881.295.200
							Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	539.300.500
								Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	192.580.900
								Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	159.551.600

		Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 Dalam Rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	95	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	109.067.900
								Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	329.025.576
								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	446.356.500
		Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	60				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam	10 Dokumen	561.188.400

									Negeri		
								Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	17.301.900
		Persentase Rancangan Perda Dan Perkada Yang Diharmonisasi	65		Persentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi	65	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang disusun	85 Dokumen	399.664.571
								Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	59 Kasus	1.158.214.000

								Pendoku mentasia n Produk Hukum dan Pengelola an Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaa n Informasi Hukum yang didokument asi	445 Dokum en	113.383.800
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------

		Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100		Persentase Kebijakan Dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan KB	2 Dokumen	103.275.640
--	--	---	-----	--	---	-----	--	---	---	-----------	-------------

								Fasilitasi pengelola an Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaa n Bina Mental Spiritual	7 Dokum en	1.013.166.15 0
								Pelaksan aan kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahter aan masyarak at	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahter aan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemuda an dan Olahraga, Pariwiata pendidikan, Kebudayaa n Perpustaka an, Kearsipan Tanstibun Linmas	2 Dokum en	96.829.195

		Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindak Lanjuti	100	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen BLUD	72.217.045
								Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan 4 kali	72.217.520

							Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	15.622.660
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	---	-----------	------------

								Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	1 Dokumen	13.263.840
							Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	466.342.200

								Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi yang disusun	2 Laporan	22.104.000
		Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	75		Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan Dengan Metode Tender	50	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	60 dokumen	577.371.275
								Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	2 Dokumen	249.331.873
								Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	45 Orang	623.905.767
											55.182.174.278

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	12,41
		2. Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	60
		3. Persentase Rancangan Perda	100

		Dan Perkada Yang Diharmonisasi	
		4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	75
		6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100
		7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	75
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	8. Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	1
		9. Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB
3	Melaksanakan Inovasi Daerah	10. Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	2



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024, yang memuat realisasi kinerja dan capaian atas target kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi pencapaiannya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu adalah Baik dengan rincian capaian target kinerja sebagai berikut :

3.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	12,41	8,86	71,39
		2. Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	60	60	100
		3. Persentase Rancangan Perda Dan Perkada Yang Diharmonisasi	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)
		4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100	100	100
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	75	75	100
		6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100	100	100
		7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	75	71	94,66
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	8. Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	1	1	100
		9. Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	-	-
3	Melaksanakan Inovasi Daerah	10. Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	2	2	100

Sumber data : Kemetrierian PANRB, Kementrian Dalam Negeri, Bagian Setda

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu setiap indikator dijelaskan secara berurutan sesuai dengan misi. Sebagai berikut:

1 Meningkatkan Kualitas kinerja Penyelenggara Pemerintah

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (satu)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi		Capaian Kinerja (%)
				2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	12,41	8,77%	8,86	71,39
		2. Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	60	-	60	100
		3. Persentase Rancangan Perda Dan Perkada Yang Diharmonisasi	100	-	100	100
		4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100	-	100	100

		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	75	-	75	100
		6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100	-	100	100
		7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	75	-	71	94,66

Sumber data : Kemeriterian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Bagian Setda

➤ **Nilai Komponen Pelaporan pada SAKIP Daerah**

Nilai Komponen Pelaporan Pada Sakip Daerah untuk tahun 2024 ini adalah 8,86% dari Target yang ditetapkan 12,41%. hasil ini berdasarkan rilis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Termasuk bagian dalam Tim SAKIP, Sekretariat Daerah Menjalankan program Peningkatan dan pengawasan akuntabilitas kinerja, Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan, dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk tahun 2023 nilai capaian ini adalah 8,77% sedangkan untuk tahun 2024 mengalami kenaikan dikit yaitu 8,86% dari target yang ditetapkan sebesar 12,41%. Tidak tercapainya sasaran Ini disebabkan Laporan Kinerja pada Pemda dan sebagian PD belum memberikan analisis yang memadai atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja.

➤ **Presentase Perikatan Kerjasama yang ditindak lanjuti**

Indikator Presentase Perikatan Kerjasama yang ditidak lanjuti, untuk di tahun 2024 semua kerjasama telah ditindak lanjuti semua. Adapun rinciannya sebagai berikut :

REKAPITULASI NOTA KESEPAKATAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA (MOU/PKS)						
DENGAN PIHAK KETIGA						
TAHUN 2024						
NO	HARI/TANGGAL PENCATATAN	NOMOR SURAT	PIHAK KETIGA	NAMA MOU / PKS	JANGKA WAKTU	DINAS TEKNIS
						PENANGGUNG JAWAB
01	RABU 03 Januari 2024	No. 100.4.7.1/01/KSDPK/B.1/2024 No. PER/13/022024	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAA KANTOR CABANG BENGKULU	Nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Bengkulu tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1 tahun 31 Desember 2024	Dinas Ketenagakerjaan
02	SENIN 29 Januari 2024	No. 100.4.7.1/02/KSDPK/B.1/2024 No. 01/MoU/D.12/2024	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bengkuludengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tentang Penggunaan Layanan Perbankan Elektronik dan Digital dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1 tahun	BPKAD
03	-	-	-	Dirjen Perbendaharaan Pajak	-	Tidak diproses
04	KAMIS 01 Agustus 2024	NO. 100.3.7/4/B.1/2024 TMS/2024	STIKES MANDIRI SAKTI	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Stikes Trimandiri Sakti tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dengan Tridharma Perguruan Tinggi	5 tahun	
05	SELASA 05 November 2024	NO. 100.8-HA.02.01.01-396 No. 100.3.7.1/05/B.1/NK/10/2024	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	Perjanjian Kerja Sama antara Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Pelayanan Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu dan Kota Bengkulu tentang Pembentukan Pos Pengaduan HAM pada kelurahan di Kota Bengkulu	5 tahun	Bagian Hukum
06	KAMIS 12 Desember 2024	NO. 100.3.7.1/6/B.1/KSDDK NO. 253/KTR/III-05/1224	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKULU	Nota kesepakatan antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	1 tahun	
07	KAMIS 12 Desember 2024	NO. 100.3.7.1/7/B.1/KSDP/2024 NO. 254/KTR/III-05/1224	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG BENGKULU	RENCANA KERJA antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja Kota Bengkulu	1 tahun	
8	SELASA 15 Oktober 2024	No. PK.84.PPKL/SETPPKL/KUM.3.1/ B/10/2024 No.119/14-TTKSD/NK/B.1/XII/2024 No. 100.3.7.1/04.1/B.1/NK/10/2024	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	Nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan pemerintah provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu tentang sinergi pengoperasian dan perawatan jaringan peralatan stasiun pemantau kualitas udara ambien	-	belum ada arsip

➤ **Persentase Rencana Perda dan Perkada yang diharmonisasi**

Untuk Indikator Perda dan Perkada yang diharmonisasi, di Tahun 2024 untuk capaian ini tercapai 100% dari target yang ditetapkan di Dokumen Perjanjiaan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024. Adapun rinciannya sebagai berikut :

DAFTAR RAPERWAL KOTA BENGKULU YANG DIHARMONISASI

No.	Judul Raperwal	Nomor surat permohonan	Ket.
1.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100.3.2/71/B.II/2024 Tanggal 15 Mei 2024	
2.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.3.2/79/B.II/2024 tanggal 28 Mei 2024	
3.	Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100.3.2/153/B.II/2024 tanggal 19 Juli 2024	
4.	Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	100.3.2/154/B.II/2024 tanggal 19 Juli 2024	
5.	Perubahan Kedua Atas Perwal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	100.3.2/155/B.II/2024 tanggal 19 Juli 2024	
6.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100.3.2/183/B.II/2024 tanggal 27 Agustus 2024	
7.	Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami	100.3.2/190/B.II/2024 tanggal 10 September 2024	
8.	Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi	100.3.2/204/B.II/2024 tanggal 3 Oktober 2024	
9.	Peraturan Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	100.3.2/205/B.II/2024 tanggal 3 Oktober 2024	
10.	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	100.3.2/233/B.II/2024 tanggal 29 Oktober 2024	
11.	Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	100.3.2/232/B.II/2024 tanggal 29 Oktober 2024	
12.	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD Kota Bengkulu	100.3.2/249/B.II/2024 tanggal 18 November 2024	

13.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	100.3.2/265/B.II/2024 tanggal 6 Desember 2024	
14.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ratu Gading Segarapati Tahun 2024-2044	100.3.2/264/B.II/2024 tanggal 6 Desember 2024	

➤ **Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan IKK LPPD Tepat Waktu**

Untuk Indikator ini dari 39 Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu hanya 27 Perangkat Daerah yang menjadi pengampu dalam pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bahan penyusunan LPPD Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2024. Perangkat Daerah yang menjadi pengampu indikator IKK tersebut semuanya telah melaporkan capaian IKK tepat waktu ke Bagian Pemerintahan Setda. Adapun daftar Perangkat Daerah tersebut sebagai berikut :

- 1 BKPSDM
- 2 BPKAD
- 3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 4 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
- 5 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 6 DINAS KOPERASI DAN UKM
- 7 DINAS KETAHANANAN PANGAN DAN PERTANIAN
- 8 DINAS PARIWISATA
- 9 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- 10 DINAS PERIKANAN
- 11 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
- 12 DINAS KESEHATAN
- 13 DINAS SOSIAL
- 14 DINAS PERHUBUNGAN
- 15 DINAS KETENAGAKERJAAN

- 16 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- 17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- 18 DP3AP2KB
- 19 DPMPTSP
- 20 DINAS PUPR
- 21 BPBD
- 22 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
- 23 SATPOL PP
- 24 BAPPEDA
- 25 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
- 26 BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
- 27 INSPEKTORAT

➤ **Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Minimal B**

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 000.8.3.4/358/B.VIII perihal penyampaian pelaporan SKM oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah Sample kepada Bagian Organisasi Setda Kota Bengkulu. Selanjutnya, Bagian Organisasi melakukan pendampingan kepada beberapa Perangkat Daerah khususnya yang belum pernah melaksanakan SKM, serta mengingatkan Perangkat Daerah terkait batas waktu pelaporan SKM. Selain itu, beberapa Perangkat Daerah juga telah mengikuti pembinaan dari Kemenpanrb terkait kebijakan SKM yaitu Bimbingan Teknis dan Survei serentak. Ada beberapa Perangkat Daerah yang telah mengikuti kegiatan dimaksud adalah Dindukcapil, DPMPTSP, dan RSHD juga termasuk peserta dalam kegiatan pembinaan dari Kemenpanrb.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 8 (delapan) Perangkat Daerah sample telah menyampaikan laporannya. Ke delapan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. DMPTSP
2. Dukcapil
3. Dinsos
4. Diknas
5. Dinkes
6. Puskesmas Kandang
2. Puskesmas Beringin Raya
3. RSHD

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 88,87. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2023 hingga 2024.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 8 (delapan) PD telah menyampaikan laporannya.
3. Dari seluruh Perangkat Daerah yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

➤ **Persentase Kebijakan yang di Tindak Lanjuti**

Indikator Kebijakan yang tidak lanjut adalah Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Gerakan Peduli Yatim (GPY).

Tujuan dari Kebijakan GPY adalah :

1. Meningkatkan kepedulian Apratur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat terhadap anak yatim membantu meringankan beban kehidupan anak yatim yang kurang mampu.
2. Memotivasi anak yatim dalam menjalankan kehidupan sehingga mendapat kasih sayang dan kebahagiaan.
3. Menerapkan infaq dan shodaqah dikalangan ASN dan Masyarakat Kota.

Sasaran GPY adalah semua anak yatim yang kurang mampu membiayai pendidikannya di Kota Bengkulu pada semua jenjang pendidikan.

➤ **Rata-rata Capaian Program Sekretariat Daerah**

Realisasi untuk indikator Rata-rata capaian program sekretariat daerah adalah 71% dari target yang ditetapkan di Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2024 sebesar 75% dengan capaian 94%. Adapun penyebab belum tercapainya indikator ini disebabkan sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesra hanya tercapai 59,39%
2. Program Perekonomian dan Pembangunan hanya tercapai 61,78%
3. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah/kota hanya tercapai 85,09%

Bagian pembangunan setda telah berkoordinasi ke Bagian-bagian di Sekretariat Daerah yang capaiannya programnya masih rendah. Dan permasalahannya rata-rata dari segi anggaran yang terkena efesiensi pada tahun 2024.

2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (tiga)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi		Capaian Kinerja (%)
				2023	2024	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	1	1	1	100
		2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	B	Blm rilis	-

Sumber data : Bagian Pembangunan dan Bagian Organisasi

➤ **Jumlah Dokumen RR Pada Perangkat Daerah**

Realisasi Capaian jumlah dokumen RR pada Perangkat Daerah untuk tahun 2024 ini telah terealisasi 1 dokumen dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 1 Dokumen dengan capaian 100%.

➤ **Nilai Akip Perangkat Daerah**

Nilai SAKIP Sekretariat Daerah untuk tahun 2023 adalah 66,36 dengan Predikat B atas hasil dari laporan kompilasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Bengkulu. Untuk tahun 2024 sampai saat ini LHE internal belum dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Bengkulu. Terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti untuk dapat meningkatkan nilai Sakip di tahun-tahun mendatang sebagai berikut :

- Terkait Perencanaan Kinerja agar Perangkat Daerah Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian renstra, sehingga mengetahui capaian kinerja program dan kegiatan apakah terdapat dampak yang signifikan terhadap isu strategis PD

3 Melaksanakan Inovasi Daerah

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi		Capaian Kinerja (%)
				2023	2024	
1	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 (satu) Tahun	2	2	2	100

Sumber data : Bagian – bagian Setda

Capaian indikator Jumlah Inovasi dalam 1 (satu) Tahun dengan sasaran strategis Melaksanakan Inovasi Daerah. Untuk tahun 2023 untuk indikator ini telah mencapai target yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah kota Bengkulu Tahun 2023. sedangkan untuk Tahun 2024 Sasaran Strategis Melaksanakan Inovasi Daerah dengan indikator kinerja jumlah Inovasi dalam 1 (satu) tahun juga telah mencapai target yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 dengan Target 2 Inovasi. Untuk tahun 2024 ini capaian kinerja untuk target ini tercapai 100% karena Sekretariat Daerah telah memiliki 2 inovasi yaitu sebagai berikut :

- CEKER (Cek kinerja realisasi SAKIP) penanggung jawab Bagian Organisasi Setda Kota Bengkulu
- GPY (Gerakan Peduli Yatim) Penanggung jawab Bagian Kesra Setda Kota Bengkulu

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bengkulu. Pada awal Tahun 2024 ditetapkan anggaran sebesar **Rp. 55.182.174.278,-**. Tetapi pada APBD Perubahan ada penambahan anggaran sebesar **Rp. 2.231.691.971** menjadi **Rp. 57.413.866.249,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 47.264.962.831,-** atau sebesar **82,32%**, dengan rincian sebagai berikut :

3.2.1 Realisasi Anggaran.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		48.722.324.466	50.906.752.982	43.321.093.689
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.986.870	17.986.870	15.691.100
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.174.950	21.174.950	20.208.100
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.633.614.328	20.864.614.199	19.886.206.903
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	999.240.000	961.550.300	829.100.000
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93.239.000	93.239.000	64.275.000
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	79.225.400	109.225.400	25.611.000
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	141.032.100	141.032.100	51.843.600
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat			

		Daerah				
		8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	447.000.000	447.000.000	116.227.500
		9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan	178.881.400	202.762.800	49.957.000
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	145.197.500	180.857.500	128.595.900
		11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.779.600	444.313.400	216.686.850
		12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.000.000	600.000.000	592.918.800
		13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	348.619.000	496.791.500	234.340.000
		14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.291.176.000	1.291.176.000	743.307.125
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.745.622.178	3.785.444.657	2.603.696.069
		16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	104.378.000	139.463.600	42.417.000
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.503.998.700	1.234.876.647	1.018.449.976
		18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.450.000	92.450.000	56.280.000
		19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.325.271.340	6.276.054.659	6.164.381.250
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.429.915.000	1.429.915.000	968.459.170
		21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.576.950.000	1.576.950.000	1.136.277.578
		22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.000.000	195.000.000	149.120.000
	7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				

		23	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	784.033.000	360.000.000	360.000.000
		24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	701.612.500	701.612.500	408.000.000
		25	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	-
	8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
		26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.005.528.500	4.758.089.800	4.318.760.773
		27	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	852.769.000	521.975.000	
		28	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.881.295.200	3.290.825.400	2.664.628.773
	9	Penataan Organisasi				
		29	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	53.500.700	146.838.000	80.691.904
		30	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	51.183.800	51.183.800	41.228.091
		31	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	72.217.400	72.217.400	61.172.436
	10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
		32	Fasilitasi Keprotokolan	539.300.500	192.580.900	144.187.191
		33	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	192.580.900	159.551.600	128.374.600
		34	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	159.551.600	159.551.600	128.374.600,00
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			4.347.473.632	4.126.156.032	2.472.837.139
	11	Administrasi Tata Pemerintahan				
		35	Penataan Administrasi Pemerintahan	109.067.900	124.442.900	29.974.380
		36	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	329.025.576	329.025.576	6.354.500
		37	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	446.356.500	446.356.500	305.736.689,00
	12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
		38	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.013.166.150	1.013.166.150	592.086.656
		39	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	103.275.640	103.275.640	28.041.302
		40	Pelaksanaan Kebijakan,			

			Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	96.829.195	96.829.195	42.098.500
	13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
		41	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	399.664.571	399.764.571	137.639.160
		42	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.158.214.000	1.329.314.000	1.244.065.433
		43	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	113.383.800	129.383.800	87.743.512
	14	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				
		44	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	561.188.400	583.652.300	304.833.696
		45	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	17.301.900	17.301.900	-
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2.112.376.180	2.380.957.235	1.471.032.003
	15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				
		46	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	72.217.045	143.260.100	52.308.000
		47	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	72.217.520	72.217.520	56.489.958
	16	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
		48	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	22.104.000	22.104.000	20.482.100
		49	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	466.342.200	466.342.200	289.326.265
	17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
		50	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	577.371.275	577.371.275	422.195.468
		51	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	249.331.873	262.331.873	187.681.166
		52	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	623.905.767	766.765.767	411.882.277
	18	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				
		53	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	15.622.660	35.731.660	19.562.873
		54	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	13.263.840	34.832.840	11.103.896
			Jumlah	55.182.174.278	57.413.866.249	47.264.962.831

Sumber Data : Bagian Pembangunan Setd



BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tergolong baik, walaupun tidak semua target yang telah ditetapkan di dalam Perjajian Kinerja dapat tercapai 100%. Kedepannya akan dilakukan perbaikan-perbaikan agar penetapan kinerja dapat lebih terukur lagi dan optimalisasi sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, agar capaian yang telah dihasilkan pada tahun 2024 dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.
2. Melakukan review terhadap beberapa indikator kinerja yang sulit diukur.
3. Meningkatkan kinerja Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bengkulu.
4. Akan mendorong agar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk dapat segera menyampaikan/mengajukan permohonan lelang barang / jasa secara elektronik melalui e-lelang / e-seleksi kepada Bagian Pengadaan Barang / Jasa setelah Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa (RUP) diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
5. Melakukan koordinasi lebih lanjut (lebih intensif) dengan *stakeholders* terkait, terkhususnya internal Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bengkulu guna tercapainya keberhasilan dalam peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

Bengkulu, 24 Februari 2025

Sekretaris Daerah

ARIF GUNADI



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2024**





**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2024**





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Supratman Kel. Bentiring Permai Telp. (0736) 21415 – 21795 - 20105 – Fax. 5611561

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA RIKA RINO

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIF GUNADI

Jabatan : Pj. Wali kota Bengkulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pj. Wali Kota Bengkulu

ARIF GUNADI

Pihak Pertama,

Pj. Sekretaris Daerah

EKA RIKA RINO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	12,41
		2. Persentase Perikatan Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	60
		3. Persentase Rancangan Perda Dan Perkada Yang Diharmonisasi	100
		4. Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	100
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	B
		6. Persentase kebijakan yang	100

		ditindaklanjuti	
		7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	75
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	8. Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	1
		9. Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB
3	Melaksanakan Inovasi Daerah	10. Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	2

**Program dan anggaran Sekretariat Daerah Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2024**

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 48.722.324.466
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 4.347.473. 632
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 2.112.376.180
	Jumlah	Rp. 55.182.174.278

Sumber Data : Bagian Pembangunan Setda

Bengkulu, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Bengkulu



ARIF GUNADI

Pihak Pertama,
Pj. Sekretaris Daerah



EKA RIKA RINO

